



PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.SI.
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.SI.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN PROVINSI
BANTEN**

Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	8 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,06 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10 Berkas Perkara

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
11	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88 Indeks
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	3 Kabupaten/Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98.78 Indeks
14	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kabupaten/Kota
15	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	76 Indeks
16	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks

1. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.434.000.000
2. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.125.000.000
3. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.52.115.000
4. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.899.137.000
5. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.177.130.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.58.280.000
7. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.788.031.000
8. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.490.000.000
9. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.388.000.000
10. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.5.169.772.000
11. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.61.500.000
12. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.54.068.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.6.753.094.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.50.000.000

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.SI.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

KEPALA BNN PROVINSI BANTEN

Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.